

GENDER DAN KOMUNIKASI POLITIK: TANTANGAN PEREMPUAN PKS DALAM PROGRAM RUMAH KELUARGA INDONESIA

Sugiarti¹, Belli Nasution², Welly Wirman³

^{1,2}Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: renyai0220@gmail.com

ABSTRACT

Women's political communication of the Pekanbaru City Prosperous Justice Party in the 2024 Legislative Election uses the Indonesian Family House (RKI) as a winning program for female legislative candidates. However, the results of the 2024 Legislative Election show that not a single PKS legislative seat in the Pekanbaru City DPRD is occupied by PKS politicians who use the RKI program. This study aims to analyze the political communication of PKS women in Pekanbaru City in relation to the RKI program. The research is qualitative with a case study approach. The study's results show that obstacles to women's political communication include the presence of gender norms and stereotypes, limited network access, and limited resources. In the gender aspect, there are still certain stereotypes, domestic problems, and networks that are not optimal. Competence is still weak in mastering political issues and their management, as well as in mass communication, such as public discussions and rhetoric. Meanwhile, empathy includes emotional approaches, social issues, and welfare, all of which also need improvement.

Keywords: Communication, women's politics, PKS

ABSTRAK

Komunikasi politik perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru pada Pemilu Legislatif tahun 2024 menggunakan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) sebagai program kemenangan untuk calon legislatif perempuan. Namun, hasil Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan tidak satu pun kursi legislatif PKS di DPRD Kota Pekanbaru diduduki oleh politisi PKS yang menggunakan program RKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik perempuan PKS Kota Pekanbaru dikaitkan dengan program RKI tersebut. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan hambatan komunikasi politik perempuan PKS meliputi adanya norma dan stereotip perempuan, akses jaringan dan sumber daya yang lemah. Pada aspek gender masih ada stereotip tertentu, masalah domestik, dan jaringan yang tidak optimal. Kompetensi juga masih lemah dalam hal penguasaan isu politik dan pengelolaannya, komunikasi massa seperti diskusi dan beretorika di publik juga terbilang lemah. Sedangkan secara empati meliputi pendekatan emosional, isu sosial dan kesejahteraan yang juga perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Komunikasi, politik perempuan, PKS

Pendahuluan

Komunikasi merupakan disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam berbagai aspek ruang lingkup kehidupan. Di bidang politik, komunikasi hadir sebagai komunikasi politik yang membantu proses politik dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Komunikator, komunikan, media, pesan, dan efek dari sebuah komunikasi dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan politik. Pesan-pesan politik hadir dalam proses komunikasi yang disampaikan seorang komunikator kepada komunikan melalui media tertentu. Sebuah proses komunikasi yang baik dan efektif dibutuhkan dalam politik. Aktor-aktor politik perlu

memahami dengan baik bagaimana pesan-pesan disampaikan kepada komunikan yang bisa menimbulkan efek politik.

Konstelasi perpolitikan nasional di parlemen sendiri tidak lepas dari peran keterwakilan legislator perempuan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2017 telah menetapkan angka 30% untuk keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif Pemilihan Umum. Aturan tersebut praktis mendorong keterlibatan perempuan dalam politik menjadi semakin besar. Politisi perempuan di setiap partai politik dituntut untuk bergerak melakukan komunikasi dan lobi-lobi politik guna meningkatkan elektabilitas personal dan partai yang dibutuhkan untuk meraih capaian kursi yang menjadi target.

Berdasarkan data dokumen Daftar Calon Tetap (DCT) DPR dari KPU tahun 2023 yang dirilis KPU, Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya partai politik yang memenuhi keterwakilan 100 % caleg perempuan secara nasional dan daerah. Capaian ini tidak lepas dari partisipasi kader-kader perempuan di struktur Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merancang program dan kegiatan di masyarakat. PKS menjadi salah satu partai politik yang memiliki mesin partai dengan penggerak yang cukup militan dari kalangan perempuan. Fungsionaris (pengurus) perempuan PKS bergerak melalui program-program yang terangkum di Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) yang ada di setiap level kepengurusan (Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Pimpinan Ranting).

Berdasarkan data dari dokumen hasil sosialisasi Munas Partai Keadilan Sejahtera tahun 2020 yang dihimpun penulis, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga partai tersebut menetapkan Program RKI sebagai program utama komunikasi politik Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga dari PKS untuk kemenangan Pemilu 2024. Pada tahun 2023 hingga 2024, ditargetkan sebanyak 8.000 pertambahan titik RKI baru dan 100.000 orang relawan RKI di seluruh Indonesia untuk mendukung kemenangan PKS pada 2024 (sumber data dokumen Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS). Nantinya, baik titik RKI maupun relawan akan bergerak merekrut anggota baru partai melalui pembuatan Kartu Tanda Anggota, sekaligus berperan dalam program-program kemenangan PKS.

Berdasarkan observasi penulis, Rumah Keluarga Indonesia merupakan program pemberdayaan dan ketahanan keluarga unggulan yang mencakup beberapa aspek, yakni Pembinaan Keluarga Sakinah, Kajian Pra Nikah, Pembinaan Lansia, Pembinaan Ekonomi Keluarga, dan Pembinaan Remaja. Program ini digulirkan PKS dari tingkat pusat ke struktur terendah di tingkat kelurahan (Dewan Perwakilan Ranting). Program RKI berada di bawah tanggung jawab Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS yang ada di setiap level. Sebagai penggerak program ini, PKS melakukan rekrutmen anggota program yang sekaligus juga tergabung sebagai anggota PKS. Melalui program ini, para fungsionaris perempuan PKS Kota Pekanbaru di setiap level bergerak melakukan komunikasi politik untuk mencapai kemenangan di Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Rumah Keluarga Indonesia ini biasanya berpusat di satu titik sekretariat tertentu milik kader atau relawan PKS. Di sekretariat tersebut dipusatkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga sebagaimana dijelaskan di atas.

Berdasarkan data hasil perolehan kursi Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024, diperoleh angka yang menarik untuk diteliti. Program RKI di beberapa daerah menampilkan hasil yang

variatif. Provinsi Jakarta berhasil mendudukkan PKS sebagai peraih kursi terbanyak, termasuk di dalamnya legislator perempuan. Sementara di daerah lain seperti Riau, adanya program RKI yang sudah digulirkan secara masif tersebut tidak berdampak pada capaian perolehan kursi legislator perempuan. Dari jumlah 10 kursi DPRD Provinsi Riau yang diraih PKS, total seluruh peraihannya adalah legislator laki-laki. Sementara untuk Kota Pekanbaru, hanya ada satu kursi legislator perempuan yang tidak menggunakan RKI sebagai program komunikasi politik kampanyenya. Menariknya lagi, 3 anggota legislatif perempuan PKS di Riau yang sebelumnya menjabat justru tidak terpilih lagi pada Pemilu Legislatif 2024 tersebut.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak merumuskan tentang komunikasi politik yang dilakukan PKS. Komunikasi politik PKS secara rinci telah dirumuskan oleh Suryana (2021) yang mengungkap model komunikasi politik PKS meliputi dua aspek, yakni komunikasi pada internal kader yang berbentuk pengajian dan komunikasi dalam konteks suksesi terhadap masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial, pengajian umum, dan sosialisasi *door to door*. Namun, penelitian ini belum merinci secara spesifik strategi komunikasi yang dilakukan fungsionaris perempuan PKS secara khusus. Penggunaan media baru dan konvensional masih menjadi cara PKS dalam berkomunikasi politik (Anwar, 2015).

Keberadaan fungsionaris perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera memiliki *bargaining power* yang berpengaruh secara internal dan eksternal. Secara internal, perempuan di fungsionaris PKS menduduki jabatan strategis sebagai kepala bidang di tingkat Badan Pengurus Harian dan persentase calon anggota dewan dari kalangan perempuan mencapai angka 30% (Adibah, et al., 2022).

Hasil Pemilihan Umum PKS di tahun 2009 dan 2014 tidak lepas dari peran dan militansi kader yang cukup menonjol di partai tersebut, termasuk kalangan perempuan. Militansi tersebut terbentuk dari proses kaderisasi partai yang rapi dan metodik (Triono, T., et al., 2018). Kondisi militansi tersebut terimplementasi dalam bentuk komunikasi politik di setiap momen kemenangan pemilu. Perlu dikaji bagaimana komunikasi yang dibentuk melalui program-program khusus perempuan melalui penelitian lebih lanjut.

Pada pemilu 2014 sebelumnya (tiga tahun setelah peluncuran RKI untuk pertama kalinya), masih terdapat kendala-kendala keterpilihan politisi perempuan PKS. Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2014 menggunakan pola rekrutmen politik yang tertutup. Kadernya tidak bisa memilih sendiri, melainkan dicalonkan oleh PKS. Semua proses hanya dilakukan oleh Tim Panjatida dan internal anggota PKS. Rekrutmen tidak dipublikasikan kepada publik. PKS mencari bibit dari anggota PKS. Jika kurang, maka partai akan merekrut calon dari luar dengan pendekatan individual. Permasalahan lain yang membuat caleg perempuan PKS gagal memperoleh kursi caleg adalah kurang strategisnya pencalonan dengan mencalonkan dua orang dalam satu keluarga, berbeda daerah tempat tinggal, sistem penomoran kursi tidak mendukung perempuan, kurangnya mobilisasi dan pasifnya caleg perempuan (Andari et al., 2014).

Selanjutnya, di beberapa daerah pada Pemilu 2019, dengan populasi kader yang minim, PKS belum bisa menghadirkan keterwakilan perempuan di parlemen dengan modal komunikasi politik melalui program-program pemberdayaan perempuan (Brilliant, et al., 2022). Walaupun demikian, di internal partai, perempuan PKS mampu memberikan *bargaining power* sehingga mempengaruhi penentuan kebijakan partai (Adibah, N., & Jatiningsih 2022). Faktor belum tercapainya angka 30% keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh berbagai faktor

seperti budaya patriarki yang menyebabkan PKS seperti di Gorontalo belum mencapai angka tersebut (Walahe, 2018).

Apa sebenarnya yang menjadi masalah pada komunikasi politik perempuan secara umum? Sebuah penelitian menyebutkan Nurussa'adah (2020) adanya persepsi perempuan lemah sehingga tidak bisa tampil setara dengan laki-laki menjadi salah satu penyebab hal tersebut. Komunikasi politik perempuan pada Pemilu di DIY memperlihatkan kemampuan perempuan sebagai komunikator politik dalam pemilihan umum, yakni melalui peran sebagai penghubung dengan masyarakat umum dan menjadi jembatan kepentingan kalangan perempuan secara khusus. Tingkat pendidikan, kemandirian ekonomi, nilai budaya, dan sistem politik yang ada menjadi hal-hal yang memengaruhi keberhasilan sebuah proses komunikasi politik yang dilakukan (Yozani, et al., 2024).

Hal berbeda diungkapkan oleh (Setiawati, T., & Agustini 2024). Penelitian keduanya menyebutkan bahwa latar belakang seorang perempuan yang terlibat di dunia politik tidak sepenuhnya karena keinginan pribadi, melainkan lebih karena mengikuti jejak orang-orang terdekat dan memenuhi keinginan orang lain. Lebih kepada dorongan eksternal, bukan atas keinginan pribadi. Sementara di satu sisi beban ganda dirasakan oleh perempuan. Perempuan harus berperan di ranah domestik dan publik, serta menghadapi kesenjangan sosial dan budaya serta dipandang remeh sebagai perempuan. Terkait strategi komunikasi politik, perempuan cenderung lebih banyak berkomunikasi dengan sesama perempuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik pemberdayaan perempuan. Kesamaan gender masih diyakini mampu secara efektif meningkatkan tujuan politik.

Sebagai pemahaman terhadap makna dan proses komunikasi politik perempuan, perlu diketahui beberapa konsep terkait hal ini. Penelitian (Carroll, S. J., & Fox, 2018) mendefinisikan komunikasi politik perempuan sebagai strategi yang digunakan oleh politisi perempuan selama kampanye untuk mengatasi hambatan gender. Ini termasuk penggunaan pesan yang menekankan kompetensi, empati, dan kemampuan untuk bekerja sama.

Pada sebuah negara yang menganut sistem nilai patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga (Parawansa, 2002). Matland menemukan bahwa bias gender berkorelasi dengan kemampuan kandidat politik untuk berargumentasi. Pengamat politik menganggap bahwa karakter individu baik yang tayang di media-media maupun secara langsung, menjadi penting dan dijadikan penilaian oleh pemilih (Jenssen, 2006). Konsep pemasaran politik Niffenegger (1998) mengusulkan konsep pemasaran politik yang menunjukkan penggunaan alat bauran pemasaran klasik untuk kampanye politik. Ia menekankan bahwa pemasaran politik mencakup upaya yang ditujukan pada integrasi dalam bauran pemasaran, yang dikenal sebagai empat P—secara tradisional *product, promotion, price, and place* untuk mengendalikan perilaku pemilih secara efisien (Cwalina, W, et al., 2015).

Apa yang terjadi dengan komunikasi politik perempuan di PKS sendiri membutuhkan kajian, mengapa program Rumah Keluarga Indonesia yang sudah dirancang dan dilaksanakan tidak efektif menghasilkan anggota legislatif perempuan. Penelitian tentang program Rumah Keluarga Indonesia ini dipandang penting karena terkait dengan inti komunikasi politik

perempuan yang dibangun PKS secara maksimal sudah dilakukan melalui program tersebut (Solakhudin, et al., 2024).

Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam bagaimana komunikasi politik perempuan PKS Pekanbaru yang bekerja untuk meraih target kemenangan dalam Pemilu 2024 melalui RKI. Bagaimana bentuk program-program yang dijalankan dan strategi marketing politiknya dalam membangun komunikasi politik di masyarakat menjelang Pemilu 2024. Atas kondisi tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana komunikasi politik perempuan PKS di Kota Pekanbaru melalui program bidang perempuan, yakni Rumah Keluarga Indonesia. Penelitian hanya bersifat evaluatif terhadap komunikasi politik perempuan yang dilakukan.

Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Studi kasus menurut Sugiyono (2015) adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Stake (1995) mengemukakan bahwa studi kasus adalah penelitian mengenai kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal, dengan tujuan memahami aktivitasnya dalam situasi yang penting. Yin (2014) menjelaskan bahwa studi kasus adalah penelitian empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Dalam penelitian kali ini, yang menjadi subjek penelitian adalah perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pekanbaru yang menjadi calon legislatif pada Pemilu tahun 2024. Sedangkan objek penelitian yang diteliti adalah Komunikasi Politik Perempuan dari Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Partai Keadilan Sejahtera sebagai bentuk program komunikasi politik perempuan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Pekanbaru.

Pada penelitian ini dipilih sebanyak empat orang informan caleg perempuan PKS Kota Pekanbaru, dua orang masyarakat penerima manfaat program RKI, dan satu orang caleg laki-laki PKS terpilih di DPD PKS Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif lengkap, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui kondensasi data, data display, dan verifikasi kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi (teknik dan sumber).

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi Politik Perempuan

Carroll, S. J., & Fox (2018) mendefinisikan komunikasi politik perempuan sebagai strategi yang digunakan oleh politisi perempuan selama kampanye untuk mengatasi hambatan dan persoalan gender. Hal ini juga mencakup penggunaan pesan-pesan politik dari aspek kompetensi dan empati. Walaupun jumlah perempuan di ranah politik semakin banyak, perempuan tetap menghadapi masalah struktural dan kultural yang memengaruhi representasinya. Representasi tersebut mencakup jumlah dan bagaimana citra perempuan dalam perspektif masyarakat dan media.

Pada sebuah negara yang menganut sistem nilai patriarki, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga (Parawansa, 2002).

Media digital di era modern memberi peluang yang lebih besar bagi politisi perempuan untuk memengaruhi narasi politik, tantangan berupa bias gender dan stereotip masih tetap ada. Namun, melalui strategi komunikasi yang lebih empatik, penggunaan media sosial, dan narasi personal, perempuan politikus dapat menavigasi tantangan ini dan membangun pengaruh mereka dalam ranah politik (Perloff, 2021)

Dalam penelitian ini, mengacu pada konsep Carroll dan Fox di atas, akan dikaji komunikasi politik perempuan yang mencakup aspek yang paling berhubungan dengan objek penelitian, yakni hambatan, gender, kompetensi, dan empati. Berikut ini pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya:

Hambatan

Menurut Carroll, S. J., & Fox (2018), hambatan dalam komunikasi politik perempuan dapat diartikan sebagai kendala atau tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam menyampaikan pesan, pendapat, atau aspirasi politik mereka. Hambatan ini bisa berupa faktor struktural, kultural, atau individual yang menghalangi partisipasi efektif perempuan dalam politik. Beberapa poin yang termasuk dalam hambatan tersebut menurut Carroll, S. J., & Fox (2018), yakni: (1) Norma dan Stereotip Perempuan, yakni norma sosial dan stereotip yang menganggap bahwa politik adalah domain laki-laki dan bahwa perempuan tidak kompeten dalam bidang ini. Hambatan yang bersifat norma dan stereotip gender pada komunikasi politik perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru tergambar dari perspektif segmen pasar yang dipilih oleh PKS sendiri. Sebagai partai yang identik dengan nilai-nilai dakwah, PKS merambah segmen pemilih kaum agamis baik dari kalangan perempuan maupun laki-laki.

Dalam penelitian sebelumnya Suryana (2021) disebutkan pola komunikasi politik yang dijalankan oleh PKS dikategorikan pada dua kategori besar, yakni; komunikasi terhadap kader yang pada umumnya melalui kajian-kajian Islam dan politik; dan komunikasi dalam konteks suksesi atau menghadapi perhelatan Pilkada yang biasanya dilakukan melalui kegiatan umum, salah satunya pengajian. Dalam hal ini, segmen kalangan agamis menjadi salah satu basis massa yang ditargetkan sebagai pemilih PKS itu sendiri.

Sama halnya dengan penelitian di atas, segmen pemilih politisi perempuan dari PKS Pekanbaru adalah kalangan ibu-ibu majelis taklim, segmen pengikut pengajian di masjid, dan masyarakat yang dipandang memiliki pemahaman agama yang lebih dalam. Di satu sisi segmen ini akan menjadi basis sosial pemilih yang cukup kuat bagi PKS, tetapi tidak pada calon-calon politisi perempuan dari PKS itu sendiri. Masyarakat dari segmen pemilih agamis masih memandang bahwa pemimpin mereka adalah kalangan pria, sehingga calon-calon politisi perempuan PKS tidak menjadi prioritas untuk dipilih.

Program-program Rumah Keluarga Indonesia yang digawangi para calon-calon legislatif perempuan PKS Kota Pekanbaru tetap diikuti, tetapi tidak menjamin masyarakat memilih calon perempuan. Pilihan khalayak cenderung tetap kepada kalangan calon dari politisi laki-laki. Kalangan caleg laki-laki PKS sendiri dikenal sebagian sebagai ustaz sehingga menjadi alasan yang lebih kuat untuk dipilih menjadi pemimpin oleh segmen pemilih PKS dari kalangan religius. Program Rumah Keluarga Indonesia pada akhirnya tidak memberikan efek keterpilihan yang signifikan bagi calon legislatif perempuan PKS. Program tersebut justru berdampak pada keterpilihan caleg laki-laki. Caleg laki-laki dipandang lebih memiliki

kelayakan untuk memimpin berdasarkan pemahaman religiusitas target marketing politik dari caleg perempuan PKS sendiri. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Walahe (2018) menyebutkan budaya patriarki masih terjadi di dalam PKS yang menyebabkan PKS di daerah Gorontalo menghambat pencalonan caleg perempuan. Hal serupa ternyata juga masih terjadi di kalangan pemilih PKS Kota Pekanbaru, baik yang dari kalangan kader internal maupun konstituen masyarakat yang berasal dari segmen kalangan religius.

Persoalan budaya patriarki yang menghambat caleg perempuan tersebut tidak hanya terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera. Pada partai-partai lainnya, hal ini juga terjadi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hendika (2022) menyebutkan sebuah penelitian yang mengungkap politisi perempuan dari Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi juga mengalami masalah serupa. Persepsi bahwa laki-laki lebih layak menjadi pemimpin dalam politik menjadi penghambat keterpilihan caleg perempuan. Demikian juga yang terjadi di Partai Gerindra. Penelitian Hendika (2022) menyebutkan bahwa hambatan dalam pemberdayaan perempuan yang dilakukan Partai Gerindra di Sidoarjo juga terkendala budaya patriarki dan persoalan domestik perempuan. Budaya patriarki yang dialami politisi perempuan Partai Golkar juga sudah diteliti oleh (Tri and Ningsih 2016), yang menyebutkan faktor penghambat representasi perempuan dari Partai Golkar di Dewan Kabupaten Berau salah satunya adalah budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat. (2) Akses Jaringan dan Sumber Daya, dalam konteks akses jaringan dan sumber daya, perempuan sering kali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap jaringan politik dan sumber daya yang diperlukan untuk kampanye dan aktivitas politik.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Brilliant, C., Tawakkal, G. T. I., & Rohman (2022), ditemukan hasil penelitian adanya kendala kelembagaan di internal PKS yang terjadi pada PKS di DPRD Kabupaten Trenggalek. Kendala yang terjadi salah satunya adalah soal sumber daya. Sumber daya yang dimiliki kalangan perempuan relatif lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sumber daya meliputi sumber daya manusia hingga dana yang dimiliki. Diketahui akses jaringan seperti tim relawan dari caleg perempuan PKS sendiri masih terbatas. Kalangan relawan dan tim-tim yang ada di struktur partai lebih fokus memenangkan calon-calon dari kalangan caleg laki-laki. Alasan sederhananya adalah kepemilikan sumber dana dari caleg laki-laki yang dinilai lebih besar dibandingkan dengan caleg perempuan. Sumber daya dana menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam pemanfaatan Rumah Keluarga Indonesia untuk marketing caleg perempuan PKS. Siapa yang memiliki sumber daya lebih, maka dia yang bisa mengelola program lebih optimal.

Program Rumah Keluarga Indonesia dibiayai oleh caleg terkait. Oleh karena caleg laki-laki diketahui memiliki sumber dana yang lebih besar dibandingkan dengan caleg perempuan, kegiatan-kegiatan lebih bisa diberdayakan oleh caleg pria sendiri. Melalui program tersebut, para caleg laki-laki pun mendapatkan manfaat pemasaran politik dari kalangan perempuan. Hambatan caleg perempuan yang terjadi di PKS Kota Pekanbaru juga terkait dengan dorongan keinginan secara pribadi ke ranah politik yang memang belum kuat. Keinginan untuk maju ke pencalonan tidak sepenuhnya berasal dari keinginan pribadi, tetapi dari dorongan lingkungan di sekitarnya. Masalah domestik membuat perempuan tidak maksimal dalam melakukan aktivitas politiknya di luar rumah. Penelitian yang dilakukan Setiawati, T., & Agustini (2024) menyebutkan bahwa perempuan yang terlibat dalam dunia politik tidak sepenuhnya atas keinginan pribadi, tetapi mengikuti keinginan orang lain yang ada di sekitarnya. Hal tersebut

juga terjadi pada caleg perempuan PKS Kota Pekanbaru sehingga memengaruhi efektivitas hasil komunikasi politik yang dilakukan.

Gender

Menurut Carroll, S. J., & Fox (2018), gender memainkan peran signifikan dalam komunikasi politik perempuan, memengaruhi bagaimana perempuan berinteraksi dalam ranah politik dan bagaimana mereka diterima oleh masyarakat. Gender dalam komunikasi politik perempuan dapat diartikan sebagai serangkaian norma, harapan, dan peran yang dibentuk oleh masyarakat dan dikaitkan dengan identitas perempuan, yang kemudian memengaruhi cara perempuan berkomunikasi, berpartisipasi, dan diakui dalam politik. Berikut beberapa poin utama terkait makna gender dalam komunikasi politik perempuan menurut Carrol dan Fox: (1) Norma sosial dan stereotip gender memengaruhi persepsi terhadap perempuan dalam politik. Perempuan sering kali dihadapkan pada ekspektasi sosial yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki, yang dapat membatasi cara mereka berkomunikasi dan berpartisipasi. Jika seorang wanita keluar pada pukul 6 pagi untuk membersihkan kantor demi menjaga keluarganya, membesarkan anak-anaknya, ia akan ditampilkan sebagai pahlawan. Jika ia ingin menjalankan kantor itu, ia akan ditampilkan sebagai perempuan yang tidak wajar dan, lebih buruk lagi, sebagai ibu yang tidak wajar (Ross 2000).

Makna gender dalam ungkapan tersebut tercermin dalam kehidupan berpolitik. Aspek norma dan stereotip terhadap gender menjadi faktor penting dalam komunikasi politik perempuan. Pandangan norma negatif sering dipersepsikan kepada kalangan perempuan yang terlibat dalam ranah politik. Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru yang mengusung calon-calon legislatif perempuan dengan jumlah kuota 30 persen terpenuhi masih memiliki kendala dalam aspek gender. Stereotip dan norma yang negatif masih dipersepsikan terhadap caleg-caleg perempuan yang maju dan berjuang di kancah politik. Munculnya stereotip gender dan norma sosial yang disebutkan oleh informan di atas menjadi modal bagi *marketing* kompetitor caleg-caleg perempuan PKS dari kalangan caleg laki-laki. Dalam satu daerah pemilihan terdapat nomor urut calon legislatif. Nomor urut pertama untuk daerah pemilihan dari PKS di seluruh Kota Pekanbaru seluruhnya menempatkan caleg laki-laki di urutan pertama. Tidak ada daerah pemilihan untuk Kota Pekanbaru yang menempatkan caleg perempuan di nomor urut pertama. Hal tersebut menjadi satu persepsi persoalan stereotip gender bagi caleg-caleg perempuan PKS Kota Pekanbaru.

Persoalan norma sosial dan stereotip gender pada caleg perempuan PKS terjadi akibat peran struktur yang memberikan dukungan penuh terhadap caleg-caleg laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Pengurus-pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan) hingga Dewan Pimpinan Ranting (Kelurahan) didominasi oleh kalangan laki-laki, sehingga secara struktural dukungan juga diberikan kepada caleg laki-laki yang umumnya juga menjabat di struktur. Program Rumah Keluarga Indonesia yang ada di tingkat kecamatan pun digunakan untuk pemenangan caleg-caleg laki-laki dari PKS.

Penelitian Ramadhany, D., & Rahmawati (2020) menyebutkan meskipun sistem politik Pemilu memungkinkan caleg perempuan untuk mengajukan diri, tetapi kebiasaan politik patriarki dalam praktiknya didominasi oleh struktur kelas dalam masyarakat yang

menyebabkan caleg perempuan tidak memungkinkan mendapatkan suara yang lebih besar dari caleg laki-laki.

Penelitian lainnya dikemukakan Walahe (2018) yang menyebutkan bahwa hal yang menjadi penghambat pada keterwakilan perempuan di PKS Gorontalo adalah soal budaya patriarki yang masih terjadi di PKS. Budaya ini memandang laki-laki yang cenderung memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap faktor dari partai politik itu sendiri yang menjadi kendala. Partai kadang-kadang tidak memberi kesempatan bagi perempuan untuk menempati posisi yang strategis. Hasil penelitian di atas sejalan dengan masalah yang terjadi di PKS Kota Pekanbaru. Caleg perempuan masih mengalami budaya patriarki dan kendala dari partai politik itu sendiri. Pada akhirnya, pemenuhan kuota 30 persen caleg perempuan PKS di Kota Pekanbaru yang sudah terpenuhi hanya sekadar pemenuhan syarat administrasi bagi partisipasi PKS pada Pemilu Legislatif tersebut, tidak berdampak pada keterpilihan caleg perempuan itu sendiri.

Selanjutnya, (2) hambatan domestik, yakni hambatan yang bersifat domestik, masuk dalam ranah gender yang menjadi faktor dalam aktivitas berpolitik perempuan. Persoalan domestik meliputi kendala aktivitas dan tanggung jawab perempuan di tingkat keluarga dan rumah tangga. Kondisi ini berdampak pada tingkat partisipasi dan aktivitas berkomunikasi di ranah publik. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati, T., & Agustini (2024) menyebutkan beban ganda dirasakan oleh perempuan. Perempuan harus berperan di ranah domestik dan publik, serta menghadapi kesenjangan sosial dan budaya serta dipandang remeh sebagai perempuan. Terkait strategi komunikasi politik, perempuan cenderung lebih banyak berkomunikasi dengan sesama perempuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik pemberdayaan perempuan. Kesamaan gender masih diyakini mampu secara efektif meningkatkan tujuan politik.

Komunikasi politik perempuan yang dilakukan caleg perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru menggunakan Rumah Keluarga Indonesia masih lebih dominan menyasar segmen kalangan perempuan. Komunikasi politik yang dilakukan cenderung hanya kepada kalangan perempuan saja. Dalam hal ini, kesamaan gender masih diyakini akan memberikan efek yang lebih baik dalam peningkatan jumlah suara bagi caleg perempuan. Namun, segmen yang dipilih tersebut ternyata tidak memberikan dampak pada keterpilihan. Segmen perempuan dari kalangan religius justru masih memandang faktor gender tersebut sebagai hambatan untuk memilih calon. Perempuan tugas utamanya menunaikan pekerjaan domestik di rumah, dan di ranah politik akan lebih baik jika diberikan kepada kalangan laki-laki. Poin lainnya adalah (3) Jaringan Gender, Dalam menjalankan aktivitas politiknya, perempuan sering kali membangun jaringan yang berbasis gender untuk mengatasi hambatan dan memperkuat suara mereka dalam politik. Hal ini mencakup penggunaan strategi komunikasi yang berbeda untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan.

Secara struktural, calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru membangun jaringan berbasis gender dalam Rumah Keluarga Indonesia. Jaringan RKI ini berdiri di level kelurahan, kecamatan, dan kota yang menyasar segmen kalangan perempuan ekonomi bawah. Jaringan tersebut dikelola oleh kader-kader perempuan di kepengurusan terdekat. Jaringan ini dimaksudkan untuk mempermudah pengumpulan massa, rekrutmen, dan pengelolaan program secara struktural. Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru sendiri

menjadi struktur dengan perkembangan program Rumah Keluarga Indonesia paling pesat di Provinsi Riau. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Kota Pekanbaru menjadi DPD dengan status A di tingkat Riau. Level status ini ditentukan dari jumlah kader, jumlah anggota dewan yang menjabat hingga kinerja struktur partai.

Perkembangan jaringan gender yang terbentuk melalui program RKI PKS Kota Pekanbaru bergerak masif mengadakan berbagai kegiatan rutin setiap pekan. Program Rumah Keluarga Indonesia tersebut bahkan dijalankan sejak masa kampanye ditetapkan. Sejak mulai ditetapkan tahun 2020 sebagai program unggulan bidang perempuan dari PKS, struktur PKS Kota Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin di masyarakat seperti senam sehat, pertemuan kreasi membuat kue, sabun cuci, kajian tahsin, dan sebagainya. Kegiatan tersebut semakin meningkat intensitasnya menjelang Pemilu Legislatif tahun 2024.

Jaringan perempuan yang tergabung dalam Rumah Keluarga Indonesia Pekanbaru tersebut selanjutnya diberi tugas oleh Bidang Perempuan PKS dari tingkat di atasnya untuk mendukung sepenuhnya kemenangan Pemilu Legislatif PKS di Kota Pekanbaru. Hal tersebut juga berlaku di daerah-daerah lain, baik di kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Riau maupun di seluruh kabupaten lain yang ada di Indonesia.

Rumah Keluarga Indonesia yang terbentuk menjadi jaringan massa bagi perempuan PKS dalam melakukan konsolidasi partai, sosialisasi, hingga kampanye di masyarakat. Fungsi tersebut berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang berlangsung pada bulan Februari 2024 lalu dan dilanjutkan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah pada November 2024. Pada pelaksanaan Pilkada, RKI ditugaskan untuk membantu kemenangan Pilkada dalam ruang koalisi bersama perempuan dari partai politik lainnya. Jaringan gender melalui RKI ini sebelumnya difokuskan lebih mendalam untuk mendukung kemenangan PKS pada Pileg dan Pilpres yang sudah terlaksana pada Februari 2024 lalu. Adapun Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ini melibatkan sepenuhnya PKS dalam proses politiknya, berbeda dengan Pilkada di mana PKS lebih banyak melakukan koalisi dengan partai lainnya. Perempuan PKS melalui RKI berkoalisi dengan perempuan dari partai politik lainnya untuk proses kemenangan calon yang diusung.

Kompetensi

Menurut Carroll dan Fox (2018), kompetensi dalam komunikasi politik perempuan merujuk pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh perempuan untuk secara efektif berpartisipasi dan berkomunikasi dalam konteks politik. Hal ini mencakup pengetahuan dan pemahaman mengenai isu-isu politik, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif, serta kemampuan untuk terlibat dalam debat dan diskusi politik dengan cara yang meyakinkan. Kompetensi ini juga melibatkan pemahaman tentang dinamika kekuasaan dan gender, serta kemampuan untuk menavigasi berbagai hambatan dan tantangan yang sering dihadapi oleh perempuan dalam arena politik. Carroll dan Fox menekankan pentingnya perempuan mengembangkan kompetensi ini untuk memastikan representasi dan partisipasi yang lebih baik dalam proses politik.

Penelitian Indriastuti, Y. (2018) menyebutkan bahwa politisi perempuan terbilang sangat lemah dalam penguasaan pengetahuan mengenai politik. Hal ini menyebabkan adaptasi di perpolitikan tersebut sendiri menjadi kurang baik bagi perempuan. Kompetensi perempuan

akan sedikit meningkat setelah perempuan menduduki posisi kepemimpinan seperti kepala daerah. Aspek kompetensi dalam hal pengetahuan isu-isu politik yang dimiliki caleg perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru cukup bisa berkompetisi dengan sesama caleg perempuan, tetapi jika dibandingkan dengan pengetahuan caleg laki-laki, caleg perempuan masih di bawah caleg laki-laki. Hal tersebut dimunculkan dalam program-program yang dilakukan Rumah Keluarga Indonesia kepada masyarakat. Sebagai contoh, isu perpolitikan yang berdampak pada kondisi ekonomi direspons oleh perempuan PKS Kota Pekanbaru dengan melakukan program sembako murah, bakti sosial, pelatihan UMKM, bantuan beras, dan sebagainya. Program tersebut diwujudkan sebagai bentuk implementasi pemahaman kondisi ekonomi dan perpolitikan secara nasional.

Namun, dalam hal komunikasi politik, perempuan PKS kepada konstituennya lagi-lagi terhambat oleh faktor sumber daya. Caleg perempuan PKS Pekanbaru tidak memiliki pembiayaan dan jaringan yang cukup dibandingkan dengan caleg laki-laki, sehingga program-program yang ada di RKI didominasi oleh caleg laki-laki sebagai investor. Kompetensi komunikasi politik perempuan juga menyangkut bagaimana kemampuan perempuan dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif kepada khalayak. Dalam hal ini, terkait dengan penguasaan isu yang dihubungkan dengan kemampuan retorika berbicara di depan publik untuk meyakinkan calon pemilih dalam membuat keputusan. Retorika yang baik dapat menjadi cara bagi seorang politisi sebagai komunikator politik dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya sekaligus melakukan persuasi kepada komunikan politiknya (Sulastri et al. 2022).

Caleg perempuan PKS Kota Pekanbaru memiliki kemampuan berbicara di depan publik yang masih terbiasa dengan audiens massa yang homogen. Perempuan PKS umumnya adalah mereka yang terlibat lebih banyak dalam aktivitas majlis taklim, baik di internal partai maupun masyarakat. Materi-materi keagamaan dengan audiens yang homogen disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Hal tersebut akan berbeda kondisi dalam forum-forum politik yang heterogen. Kemampuan logos, pathos, dan ethos dalam retorika belum terbangun dengan baik pada gaya komunikasi caleg-caleg perempuan PKS Kota Pekanbaru. Kemampuan berbicara di depan publik dengan bentuk diskusi dan debat terhadap isu-isu politik masih terbilang kurang. Di dalam internal pengkaderan Partai Keadilan Sejahtera sendiri lebih banyak mengedepankan nilai-nilai islami yang menjauhi konsep-konsep perdebatan di dalam forum. Konsep *sami'na wa atho'na* (kami mendengar kami menaati) kepada pemimpin pada kader-kader perempuan PKS masih cukup kuat sehingga membuat budaya perdebatan dan diskusi menjadi minim. Hal tersebut secara langsung berdampak pada kemampuan berdebat di ruang publik bagi calon legislatif perempuan PKS yang terbilang tidak terlihat. Bila dibandingkan dengan caleg laki-laki, kemampuan untuk berbicara di depan publik masih lebih unggul daripada kalangan laki-laki.

Hal tersebut tergambar dalam penyelenggaraan program-program Rumah Keluarga Indonesia yang menghadirkan komunikator politik caleg perempuan PKS. Caleg-caleg perempuan kurang mampu menarasikan gagasan politiknya menggunakan bahasa-bahasa retorika yang persuasif kepada calon pemilih. Pola pendekatan yang dilakukan masih dalam bentuk pendekatan pribadi (fardiyah) dari setiap personalnya. Hal ini menyebabkan Rumah Keluarga Indonesia kurang maksimal digunakan sebagai media penyampai pesan-pesan politik para komunikator. Program terlaksana, tetapi khalayak tidak memiliki mendapatkan efek dari

penyampaian pesan komunikatornya. Akibatnya, tujuan politik yang diharapkan perempuan PKS Kota Pekanbaru berupa keterpilihan caleg perempuannya tidak terpenuhi.

Penelitian Aminah, A, dkk (2020) menyebutkan bahwa seleksi rekrutmen caleg perempuan PKS dilakukan oleh pengurus-pengurus perempuan di internal PKS dengan indikator penilaian berupa loyalitas dan kemampuan untuk secara bersama-sama berjuang serta mengetahui tujuan partai itu sendiri. Hal yang lebih ditekankan adalah loyalitas terhadap partai serta pengetahuan tentang bagaimana arah perjuangan partai. Adapun persoalan kompetensi adalah hal yang nantinya akan menyusul untuk ditingkatkan.

Kondisi di atas terjadi pada caleg perempuan PKS Kota Pekanbaru dalam hal perekrutan pada Pemilu Legislatif tahun 2024 yang cenderung mendadak dan lebih fokus pada faktor loyalitas anggotanya. Berdasarkan observasi penulis, caleg perempuan dari PKS Kota Pekanbaru ada yang ditunjuk menjelang detik-detik terakhir penutupan pendaftaran caleg. Alasan utama penempatannya sebagai caleg perempuan PKS adalah faktor loyalitas dan pemahaman terhadap tujuan partai yang dipandang lebih baik. Penetapan yang mendadak tersebut menyebabkan caleg bersangkutan tidak memiliki persiapan yang matang dalam hal kompetensi terkait komunikasi politik. Kompetensi seperti memahami isu politik sebagai modal produk politik yang dijual, kompetensi dalam beretorika, kompetensi dalam memanfaatkan sarana media untuk marketing politik, dan sebagainya sangat tidak maksimal dilakukan. Beberapa caleg adalah kader perempuan PKS Kota Pekanbaru yang sudah menjadi anggota partai lebih dari 20 tahun lamanya, sehingga soal loyalitas dan arah perjuangan partai, caleg perempuan PKS tersebut dipandang cukup baik dan bisa mewakili partai di parlemen. Alasan tersebut menyebabkan partai bisa langsung memilihnya sebagai caleg perempuan walaupun dilakukan secara mendadak.

Empati

Menurut Carroll, S. J., & Fox (2018), empati dalam komunikasi politik perempuan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pemikiran, dan pengalaman orang lain, serta menggunakan pemahaman ini untuk membangun hubungan yang lebih baik dan efektif dalam konteks politik. Dalam politik, empati memungkinkan pemimpin perempuan untuk lebih memahami konstituen mereka, menciptakan komunikasi yang lebih inklusif, dan mengambil keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini juga dapat membantu dalam meredakan konflik, membangun kepercayaan, dan mempromosikan kerja antarpihak yang berbeda pandangan.

Penelitian Mardhiah, A., Hidayat, D. R., Rahmat, A., & Sjafirah (2021) menyebutkan bahwa motivasi internal seorang perempuan untuk terlibat dalam dunia politik adalah karena faktor empati dan kesadaran dari perempuan terhadap pentingnya kehadiran mereka di ranah politik untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan perempuan. Selain itu, adanya ikatan emosional terhadap persoalan-persoalan sosial, agama, hingga ekonomi di masyarakat menjadikan rasa empati perempuan meningkat dan mendorong mereka untuk terlibat di ranah politik.

Selain itu, penelitian Karauwan, M. M., & El-Adawiyah (2021) menyebutkan bahwa kaum perempuan akan dapat membangun kredibilitas, daya tarik pribadi, empati, dan kekuasaan dalam politik melalui peran mereka sebagai kepala daerah dalam komunikasi politik.

Perempuan yang sudah terpilih harus menunjukkan sikap empati berupa kesungguhan membangun daerahnya untuk maju serta bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan nasib kaum perempuan. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa keberhasilan pemimpin kepala daerah perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, salah satunya dilakukan dengan bentuk komunikasi secara emosional. Komunikasi dilakukan secara dua arah antara pemimpin dan masyarakat (Situmorang, 2024). Carroll, S. J., & Fox (2018) mengungkapkan ada beberapa aspek yang berhubungan langsung dengan cara membangun empati kepada masyarakat yakni: (1) Pendekatan Emosional, Perempuan cenderung akan menunjukkan sikap empati melalui komunikasi politik mereka dengan cara menggabungkan unsur-unsur emosional. Hal ini akan berdampak pada penciptaan hubungan emosional yang lebih baik dengan konstituen. Kondisi ini akan menyebabkan pemilih merasa didengar dan dipahami oleh seorang komunikator politik perempuan.

Penelitian Nurussa'adah (2020) menyebutkan keberhasilan perempuan di ranah politik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disebabkan adanya peran perempuan sebagai penghubung dan jembatan kepentingan kalangan perempuan di masyarakat secara khusus. Peran tersebut muncul dari rasa empati secara emosional terhadap kondisi masalah-masalah perempuan yang terjadi. Caleg Perempuan PKS Kota Pekanbaru dalam melakukan pendekatan secara emosional sebagai wujud empati kepada masyarakat dilakukan melalui pola pendekatan yang dilakukan oleh PKS secara umum yakni kedekatan secara personal melalui apa yang disebut dengan istilah 'dakwah fardhiyah'. Dakwah fardhiyah merupakan pola pendekatan secara individu kepada masyarakat dengan upaya menyentuh hati dan emosional seseorang.

Pendekatan secara emosional dilakukan untuk membangun empati bukan hanya kepada calon legislatif perempuan PKS, tetapi juga pada perjuangan partai dan dakwah yang diusung PKS. Bentuk pendekatan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya partai politik dalam meraih suara pemilih di tahun 2024 dan media digital menjadi salah satu cara untuk mendukungnya (Solakhudin, 2024). Era disrupsi telah memberikan manfaat pada partai politik untuk melakukan kampanye secara murah dan efisien, tetapi di satu sisi juga memberikan peluang persaingan di media sosial yang cukup serius terkait berita hoaks (Barokah, 2024). Pelaksanaan program RKI di setiap wilayah dilakukan sebagai bentuk membangun kedekatan secara emosional dengan kalangan perempuan secara berkelompok. Materi-materi kajian keislaman, edukasi keterampilan, dan edukasi politik dilakukan untuk membangun empati masyarakat kepada komunikator-komunikator politik PKS. Bentuk komunikasi kelompok ini sendiri dinilai efektif. Sebuah penelitian menunjukkan bentuk komunikasi ini juga telah terbukti mampu merealisasikan penyusunan Prolegda Provinsi Riau yang dilakukan DPRD kepada masyarakat (Amin, 2015).

Poin selanjutnya, (2) Isu Sosial dan Kesejahteraan, di mana komunikasi politik perempuan sering kali fokus pada isu-isu sosial yang menyangkut aspek seperti kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan, di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sikap empati para komunikator politik perempuan ditunjukkan dengan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, seorang komunikator politik perempuan dituntut bisa mengartikulasikan kebijakan yang berempati terhadap kesejahteraan masyarakat luas, khususnya keluarga.

Dalam melaksanakan komunikasi politiknya di masyarakat, caleg perempuan Partai Keadilan Sejahtera secara umum telah menunjukkan sikap empatinya secara emosional terhadap masalah-masalah kesejahteraan, ekonomi, dan pendidikan di masyarakat. Empati secara emosional tersebut diwujudkan langsung dalam sebuah program bantuan ekonomi kepada masyarakat. Program Rumah Keluarga Indonesia, misalnya, telah menggagas sebuah layanan ATM Beras kepada anggota masyarakat yang terlibat di Rumah Keluarga Indonesia. Program ATM Beras merupakan layanan pengambilan beras di Kantor DPTW PKS Riau melalui media menyerupai ATM. Program tersebut muncul sebagai bentuk empati Rumah Keluarga Indonesia terhadap kondisi beras yang mahal harganya sehingga berdampak secara ekonomi pada masyarakat ekonomi kelas bawah.

Program ATM Beras tersebut sangat efektif dalam menarik perhatian masyarakat untuk bergabung dengan PKS pada masa jelang Pemilu Legislatif 2024 lalu. Namun, sebagaimana permasalahan sebelumnya, program RKI yang terbangun sebagai wujud empati bidang perempuan PKS ini pun terkendala dalam hal sumber dana saat akan dijadikan sebagai program bagi pemenangan caleg perempuan. Program ini pada akhirnya menjadi program yang efektif bagi pemenangan caleg laki-laki yang memiliki sumber dana lebih besar dalam pengelolaan dan pembiayaan program.

Bentuk lain empati caleg perempuan PKS yang terwujud melalui program Rumah Keluarga Indonesia adalah sikap empati secara religiusitas. Program pengajaran tahsin belajar Al-Quran dilakukan oleh caleg perempuan PKS yang memiliki kemampuan di bidang tersebut sebagai bentuk sikap empati atas kemampuan baca Al-Qur'an yang masih kurang di masyarakat. Program pengajaran tahsin tersebut dilakukan di rumah dan masjid sebagai wujud kepedulian perempuan PKS kepada masyarakat dalam hal pemahaman agama. Pembelajaran tersebut bersifat gratis dan kontinyu, baik jelang Pemilu maupun setelahnya. Apakah caleg terkait terpilih atau tidak, program kajian belajar tahsin terus dilakukan. Namun, persoalan lingkungan belum menjadi cakupan program dari RKI sendiri. Padahal Kota Pekanbaru memiliki masalah lingkungan yang cukup signifikan. Penelitian tentang pemilu ramah lingkungan telah dilakukan sebelumnya yang menyebutkan pentingnya kolaborasi stakeholders pelaku pemilu termasuk partai politik untuk terlibat dalam gerakan ramah lingkungan pada momen pemilu (Sulastri, 2022).

Walaupun di satu sisi caleg-caleg memberikan sikap empati terhadap isu-isu kesejahteraan, ekonomi hingga pemahaman keagamaan masyarakat, masih terdapat kelemahan yang terjadi. Sikap empati terhadap kondisi-kondisi tersebut masih terhalang dari segi keterikatan secara birokrasi dan ketersediaan sumber daya dana yang dimiliki. Masyarakat yang merasakan langsung kiprah caleg perempuan PKS di atas menunjukkan bahwa caleg perempuan PKS cenderung masih memiliki banyak keterikatan terhadap sistem aturan, masih minimnya sumber daya dana yang dimiliki sehingga tidak bisa mewujudkan sikap empatinya secara cepat dan langsung kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.

Simpulan

Komunikasi politik perempuan PKS Kota Pekanbaru menggunakan program Rumah Keluarga Indonesia pada Pemilu Legislatif tahun 2024 belum mengantarkan perolehan kursi legislatif perempuan didasarkan pada faktor hambatan, gender, kompetensi, dan empati.

Hambatan meliputi akses jaringan dan sumber daya, serta stereotip norma perempuan. Gender meliputi hambatan domestik, jaringan, dan norma sosial perempuan. Kompetensi mencakup penguasaan isu politik, retorika, dan diskusi publik. Sedangkan empati meliputi pendekatan emosional dan isu sosial kesejahteraan.

Referensi

- Adibah, N., & Jatiningsih, O. 2022. "Penguatan Bargaining Power Kader Perempuan Di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur Dalam Pengambilan Keputusan Atau Kebijakan Partai. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan." 10(3): 743–57.
- Amin, Raja Muhammad, and Auradian Marta. 2015. "Komunikasi Politik Dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2015." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*: 1–18.
- Andari, P. T. P., & Adnan, M. 2018. "Pola Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Penentuan Caleg Perempuan Pada Pileg 2014 Di Kabupaten Grobogan." *Journal of Politic and Government Studies* 7(4): 61–70.
- Anwar, M. 2015. "Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Elektabilitas Pada Pilkada 2015 Di Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3(3).
- Barokah, Fitria. 2024. "Disrupsi Politik : Peluang Dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024 Political Disruption : Opportunities and Challenges of New Political Parties Ahead of the 2024 Election." 21(01): 1–13. doi:10.35967/njip.v21i1.273.
- Brilliant, C., Tawakkal, G. T. I., & Rohman, A. Z. F. 2022. "Kelembagaan Sosiologis Terkait Ketidadaan Politikus Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Di DPRD Kabupaten Trenggalek." *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2): 183–96.
- Carroll, S. J., & Fox, R. L. 2018. "Gender and Elections: Shaping the Future of American Politics. Cambridge University Press."
- Cwalina, W., Falkowski, A., & Newman, B. I. 2015. "Political Marketing:: Theoretical and Strategic Foundations." *Routledge*.
- Hendika, R. 2022. 2019 *Pengaruh Money Politik Terhadap Pilihan Politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Jambi Tahun 2019 (Studi Kasus : Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi)*.
[https://repository.unja.ac.id/42493/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/42493/6/SKRIPSI RAFLI HENDIKA FULL.pdf](https://repository.unja.ac.id/42493/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/42493/6/SKRIPSI%20RAFLI%20HENDIKA%20FULL.pdf).
- Jenssen, Anders Todal & Toril Aalberg. 2006. A Multi- methods Approach *Party-Leader Effects in Norway*. Electoral Studies 25.
- Mardhiah, A., Hidayat, D. R., Rahmat, A., & Sjafirah, N. A. 2021. "No Title Studi Kasus Pergulatan Perempuan Selaku Legislator Aceh Di Panggung Politik Pasca Orde Baru." *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7(1): 079–094.
- Niffenegger. 1998. "Strategies for Success From Political Marketers." *Journal of Consumer Marketing* 6(1): 115–151.
- Nurussa'adah, E. 2020. "Perempuan Dan Komunikasi Politik Pada Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18(1): 111–23.
- Parawansa, Indar Khofifah. 2002. *Hambatan Terhadap Partipasi Politik Perempuan Di Indonesia*. Jakarta: International IDEA.
- Parawansa, Indar Khofifah (2002). *Hambatan terhadap Partipasi Politik Perempuan di Indonesia*. Jakarta: International IDEA
- Perloff, R. M. (2021). *The dynamics of political communication: Media and politics in a digital age*. Routledge.
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. 2020. "No Title Modal Caleg Perempuan Dan Politik Patriarkhi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia: Keterwakilan Perempuan Pada

- Pemilu 2019 Di Kabupaten Sleman.” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10(1): 39–62.
- Ross, K. 2000. In Proceedings of Political Studies Association UK 50th Annual Conference. Political Studies Association *Women Behaving Badly? Framing Gender in Political Communication*. London.
- Setiawati, T., & Agustini, V. D. 2024. “Komunikasi Dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Elektoral.” *Jurnal Pustaka Komunikasi* 7(1): 162–73.
- Situmorang, J., Yozani, R. E., & Firdaus, M. (2024). Gaya Komunikasi Bupati Indragiri Hulu dalam Melaksanakan Tugas. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23(1).
- Solakhudin, Ahmad Zaky, and Rizal Al-hamid. 2024. “Digitalization of Politics in the 2024 Election Process : The Practice of People ’ s Commodification in a Psychoanalytic Perspective Digitalisasi Politik Dalam Proses Pemilu 2024 : Praktik Komodifikasi Rakyat Dalam Perspektif Psikoanalisis.” 23(1): 17–29. doi:10.35967/njip.v23i1.667.
- Stake, R. E. 1995. *The Art of Case Study Research*. Sage Publications.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, Sri, Laras Lingganingrum, Annisa Risky Ramadan, and Tyas Hadi Angesti. 2022. “Model Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Menciptakan Pemilu Ramah Lingkungan : Studi Kasus Pada Pilkada Serentak DIY 2020 Model of Collaboration between Stakeholders in Creating Environmentally Friendly Elections : A Case Study in the 2020 Yogyakarta Simultaneous Regional Elections.” 21(02): 218–30. doi:10.35967/njip.v21i2.332.
- Suryana, C. 2021. “Politik Sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).” *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5(1).
- Tri, Reza, and Ayu Ningsih. 2016. “Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Berau.” *Journal and Proceeding FEB Unsoed* 4(4): 1603–14. <https://core.ac.uk/download/pdf/267947269.pdf>.
- Triono, T., Kartini, D. S., & Sulaeman, A. 2018. “Milisansi Kader PKS Dalam Pemenangan Politik Pada Pemilu Legislatif 2009 Dan 2014 Di Lampung.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 14(2): 140–64.
- Walahe, D. 2018. “Kekuatan Politik Perempuan Dalam Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Kabupaten Gorontalo.” *Gorontalo Journal of Public Administration Studies* 1(1): 1–15.
- Yin, R. K. 2014. *Case Study Research: Design and Methods (5th Ed.)*. Sage Publications.
- Yozani, Ringgo Eldapi, Jawalter Situmorang, and Muhammad Firdaus. 2024. “Indragiri Hulu Regent ’ s Communication Style in Carrying Out Duties Gaya Komunikasi Bupati Indragiri Hulu Dalam Menjalankan Tugas.” 23(1): 1–15. doi:10.35967/njip.v23i1.625.